

**ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN PONTESI
RETRIBUSI PASAR KABUPATEN CILACAP
TAHUN 1996 – 2001**



Disusun Oleh :

**NAMA : WILDAN HAKIM
NO MHS : 99313087**

**FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2004**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN PONTESI RETRIBUSI
PASAR KABUPATEN CILACAP
TAHUN 1996 – 2001**

Skripsi ini
Diajukan guna memenuhi syarat jenjang Strata I pada
Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

Nama : Wildan Hakim

No Mhs : 99313087

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

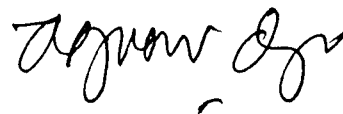
2004

LEMBAR PENGESAHAN

Yogyakarta, 8 Januari 2004

Telah Disetujui Dan Diterima Baik Oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Widarjono', written in a cursive style.

(Drs. Agus Widarjono, MA)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

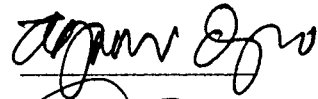
**ANALISIS EFISIENSI, EFEKTIVITAS DAN PONTESI RETRIBUSI
PASAR KABUPATEN CILACAP
TAHUN 1996 – 2001**

Disusun Oleh: Wildan Hakim
No Mhs : 99313087

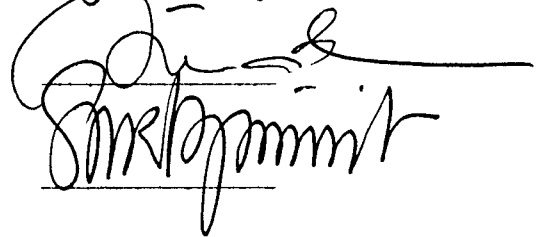
Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada tanggal 12 Februari 2004 dan dinyatakan lulus.

Yogyakarta 12 Februari 2004

Pembimbing Skripsi : Drs. Agus Widarjono, MA



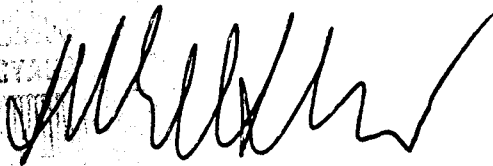
Penguji I : Drs. Sahabudin Sidiq, MA



Penguji II : Dra. Sarastri Mumpuni R, M.Si.

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi UII



Drs. H Suwarsono, MA

Motto

“ Allah akan meninggikan orang – orang yang beriman diantaramu dan orang – orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ”

(Qs Al-Mujadilah (58) : 11)

“ Jika engkau menginginkan sesuatu perkara, maka pelan – pelanlah (tenanglah), hingga Allah akan menunjukkan jalan keluar.

(HR. Bukhari)

“ Doa, usaha dan keyakinan hati yang akan membawa setiap impian menjadi kenyataan ”

“ Sebaik – baik manusia adalah orang yang banyak manfaatnya (kebaikannya) kepada manusia lainnya ”

(H.R Qadla'ie dari Jabir)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Bapak dan Ibuku tercinta yang selalu mengiringi langkahku dengan doa
 - Kakak dan adek -- adekku tersayang
 - Seseorang yang telah memberikan perhatian dan waktunya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Efisiensi, Efektivitas, dan Potensi retribusi Pasar Kabupaten Cilacap tahun 1996 – 2001** sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia bapak Drs. H. Suwarsono MA. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Drs. Agus Widarjono MA. selaku dosen pembimbing skripsi dan Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah meluangkan waktunya untuk berkonsultasi, membimbing serta mengarahkan penulis selama proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya.
4. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberi cinta, kasih dan doa yang tiada pernah henti.

5. Kakakku dan adek – adekku serta keluarga yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seseorang yang selalu memberikan cinta, doa, perhatiannya dan senantiasa menemani dalam susah maupun senang.
7. Teman – teman dimana aja kalian berada Tatat, Silo, Hita, Wiwid, Ari, Vera,Wasi, Ezo, Guruh, Undi, Rega, Sigid, Saguh, Hanif, Nenek, Nada, Kartika terima kasih atas bantuan kalian semua.
8. Adekku Andi dan temenku Umi makasih atas waktu dan pengertiannya selama ini.
9. Teman – Teman kost B 24, Iwan, Made, Deny, Oge, Acho, Saril, Sukma, Ari, Aden, Citho, Budi, Yoyok, Faisal makasih atas waktu, tempat dan segalanya.

Segala kritik dan saran terhadap skripsi ini sangat penulis harapkan, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Akhirnya, penulis berharap semoga karya yang sangat sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Amien.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 1 Januari 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1 Tujuan penelitian.....	7
1.3.2 Manfaat penelitian.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II GAMBARAN UMUM DAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN

CILACAP

2.1. Tingkat pendidikan	10
2.2. Perekonomian di kabupaten Cilacap.....	11
2.3. Perkembangan retribusi pasar kabupaten Cilacap.....	13

2.3.1. Biaya pemungutan retribusi pasar	14
2.4. Jumlah pasar dan jumlah pedagang	15
2.4.1. Jumlah pasar	15
2.4.2. Jumlah pedagang	17

BAB III KAJIAN PUSTAKA

3.1. Kajian pustaka	19
3.1.1. Abdurrahim Marsaoly	19
3.1.2. Arief Sudaryanto	20
3.1.3. Bagus Santoso	20
3.1.4. Dudi Mi'raz Imaduddin	21
3.1.5. Muhammad Aji Wibowo	22
3.1.6. Soemardji	22

BAB IV LANDASAN TEORI

4.1. Landasan Teori	
4.1.1 Pendapatan Asli Daerah	23
4.1.2 Sumber – sumber pendapatan daerah	23
4.1.3 Retribusi daerah	24
4.1.3.1. Fungsi retribusi daerah	25
4.1.3.2. Dasar hukum pemungutan retribusi pasar	26
4.1.3.3. Golongan, objek, jenis dan subyek retribusi daerah	26

4.1.3.4. Penghitungan dan pelaksanaan pemungutan retribusi.....	29
4.1.4 Retribusi pasar.....	30
4.1.4.1. Dasar hukum pemungutan retribusi pasar.....	30
4.1.4.2. Obyek, subyek dan wajib retribusi pasar	30
4.1.4.3. Tarif dan perijinan retribusi pasar	31

BAB V METODE PENELITIAN

5.1. Metode pengumpulan data	34
5.2. Subyek penelitian.....	34
5.3. Metode analisis.....	34
5.3.1. Analisis efisiensi.....	34
5.3.2. Analisis efektivitas	35
5.3.3. Potensi retribusi pasar	36
5.3.4. Analisis pertumbuhan.....	37
5.3.5. Analisis kontribusi.....	38

BAB VI DATA DAN ANALISIS DATA

6.1. Data.....	39
6.1.1. Luas lahan kios	39
6.1.2. Luas lahan los.....	39
6.1.3. Jumlah pedagang	40
6.1.4. Kelas pasar	40
6.1.5. Target dan realisasi penerimaan retribusi pasar.....	40

6.1.6. Penerimaan retribusi daerah dan PAD	40
6.1.7. Tarif dan biaya pemungutan retribusi pasar	41
6.2. Analisis data.....	41
6.2.1. Potensi penerimaan retribusi pasar kabupaten Cilacap	41
6.2.2. Efisiensi pemungutan retribusi pasar	44
6.2.3. Efektivitas pemungutan retribusi pasar	48
6.2.4. Pertumbuhan retribusi daerah dan retribusi pasar	50
6.2.4.1. Pertumbuhan retribusi daerah	50
6.2.4.2. Pertumbuhan retribusi pasar	53
6.2.5. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD	55

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan.....	58
6.2. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA.....	62
---------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap tahun 1996 – 2001	3
Tabel 1.2 Penerimaan PAD dan retribusi pasar Kabupaten Cilacap tahun 1996 – 2001	4
Tabel 1.3 Penerimaan retribusi pasar Kabupaten Cilacap tahun 1996 – 2001 ..	5
Tabel 2.1 Tingkat pendidikan Kabupaten Cilacap tahun 1995 – 2001.....	11
Tabel 2.2 PDRB perkapita atas dasar harga konstan Kabupaten Cilacap tahun 1993	12
Tabel 2.3 Penerimaan retribusi daerah dan retribusi pasar Kabupaten Cilacap tahun 1996 – 2001	14
Tabel 2.4 Biaya pemungutan retribusi pasar Kabupaten Cilacap tahun 1996 – 2001	15
Tabel 2.5 Nama pasar dan jumlah pedagang Kabupaten Cilacap tahun 2001...	18
Tabel 5.1 Kriteria efektivitas dan efisiensi kinerja.....	36
Tabel 6.1 Perbandingan potensi dengan target dan realisasi penerimaan retribusi pasar Kabupaten Cilacap tahun 2001	43
Tabel 6.2 Biaya dan jumlah pemungutan retribusi pasar Kabupaten Cilacap tahun 1996 – 2001	45
Tabel 6.3 Efisiensi retribusi pasar Kabupaten Cilacap tahun 1996 – 2001.....	45
Tabel 6.4 Efektivitas retribusi pasar Kabupaten Cilacap tahun 1996 – 2001.....	48
Tabel 6.5 Pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Cilacap tahun 1996 – 2001	51
Tabel 6.6 Pertumbuhan retribusi pasar Kabupaten Cilacap tahun 1996 – 2001.....	53
Tabel 6.7 Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD Kabupaten Cilacap tahun 1996 – 2001	56

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Berkembangnya pembangunan daerah tergantung pada kinerja pemerintah daerah, yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat dan dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan adanya otonomi daerah, pelaksanaan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah akan lebih maksimal, karena dapat mengembangkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera.

Pada dasarnya pemberian otonomi daerah dimaksud atas dasar pertimbangan bahwa daerah yang lebih mengerti kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat didaerahnya. Dengan pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memicu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya. Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab harus ditempatkan dalam kerangka yang benar yaitu memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengkoordinasikan dan mengadakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian berbagai program pembangunan. Untuk mewujudkan hal itu bukanlah merupakan suatu

pekerjaan yang mudah karena pembangunan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dibiayai dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah yang menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasikan potensi keuangannya. Bila penerimaan dari sumber penerimaan daerah cukup besar maka akan mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah di atasnya dan dengan sendirinya akan meningkatkan pula pemberian pelayanan kepada anggota masyarakat di daerahnya.¹

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara lebih otonom, mandiri dan bertanggung jawab. Agar dapat lebih Mandiri, daerah membutuhkan dana yang besar sehingga diharapkan dapat menggali potensi-potensi yang ada di daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kabupaten Cilacap sebagai salah satu wilayah yang ada di Indonesia, memiliki Pendapatan Asli Daerah yang meningkat dari tahun ke tahun. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Cilacap dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel 1.1. seperti dibawah ini :

¹ Muhammad Aji Wibowo, Efisiensi Efektifitas, Pertumbuhan dan Proporsi Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman, Tesis S2 PPS MEP UGM, 1999

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Cilacap Tahun 1996-2001
(Dalam Rupiah)

TAHUN	PAD
1996	8.245.312.000
1997	9.566.869.000
1998	14.016.803.000
1999	26.179.521.003
2000	19.278.950.738
2001	32.112.949.517

Sumber : CILACAP Dalam Angka, BPS CILACAP

Dimulai dari tahun 1996 penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap yang awalnya sebesar Rp 8.245.312.000,00 berkembang hingga menjadi Rp 32.112.949.517,00 pada tahun 2001, perkembangan ini tentunya sangat mempengaruhi perekonomian yang ada di Kabupaten Cilacap, dan berdampak langsung pada penerimaan rutin Kabupaten Cilacap. Dan Salah satu indikator mengukur kemampuan suatu daerah adalah dengan melihat perkembangan Pendapatan Asli Daerah, semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD akan menunjukkan semakin besar kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan.

Dalam Undang – Undang No 25 Tahun 1999 disebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain – lain Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Undang – Undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan pelaksanaannya, termasuk Peraturan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Cilacap setelah diberlakukannya Undang – Undang No 34 Tahun 2000, mengelola 13 jenis retribusi daerah yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akte sipil, retribusi pelayanan pengabuan mayat, retribusi parkir tepi jalan umum, retribusi pasar, pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi ijin mendirikan bangunan dan retribusi izin gangguan.

Kabupaten Cilacap memiliki retribusi daerah yang naik turun tiap tahunnya. Perkembangan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut ini :

Tabel 1.2.
PAD dan Retribusi Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 1996-2001
(Dalam Rupiah)

TAHUN	PAD	RETRIBUSI DAERAH	Kontribusi (%)
1996	8.245.312.000	4.583.433.000	55,58 %
1997	9.566.869.000	6.165.092.000	64,44%
1998	14.016.803.000	4.884.553.370	34,84%
1999	26.179.521.003	6.678.370.929	25,50%
2000	19.278.950.738	5.659.323.692	29,35%
2001	32.112.949.517	10.232.910.243	31,86%

Sumber : CILACAP Dalam Angka, BPS CILACAP

Pada tahun 1996 penerimaan retribusi daerah Kabupaten Cilacap sebesar 55,58 % dari Pendapatan Asli Daerah yang besarnya Rp 8.245.312.000,00. Angka ini berarti menggambarkan bahwa penerimaan retribusi daerah merupakan salah satu penyumbang yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah. Hingga pada tahun 2001 penerimaan retribusi daerah Kabupaten Cilacap sebesar 31,86 % dari

PAD yang besarnya Rp 32.112.949.517,00, maka dengan adanya perkembangan penerimaan tersebut retribusi daerah merupakan aset bagi Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya penerimaan retribusi daerah yang besar akan mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tiap tahunnya.

Retribusi daerah memiliki berbagai jenis pemungutan retribusi, salah satunya adalah pemungutan retribusi pasar. Retribusi pasar merupakan retribusi yang berkaitan dengan seluruh kegiatan pasar, Kabupaten Cilacap sebagai daerah yang memiliki pasar yang besar mempunyai perkembangan retribusi pasar yang setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup responsif seperti terlihat pada tabel 1.3. berikut ini :

Tabel 1.3.
Retribusi Pasar Kabupaten Cilacap
TAHUN 1996-2000
(Dalam Rupiah)

TAHUN	RETRIBUSI PASAR
1996	759.406.166
1997	1.002.798.854
1998	990.132.102
1999	1.037.602.910
2000	1.245.016.755
2001	1.592.306.564

Sumber : CILACAP Dalam Angka, BPS CILACAP

Diawali dari tahun 1996 penerimaan retribusi pasar Kabupaten Cilacap sebesar Rp 759.406.166,00 hingga pada tahun 2001 sebesar Rp 1.592.306.564,00. Perkembangan retribusi pasar ini tentunya berdampak pada penerimaan retribusi daerah, semakin besar penerimaan retribusi pasar maka semakin besar pula penerimaan retribusi daerah. Penerimaan retribusi pasar Kabupaten Cilacap yang

berfluktuatif (naik / turun) selama 5 tahun menandakan bahwa tingkat penerimaan yang dihasilkan belum begitu baik, sehingga perlu diketahui potensi – potensi apa saja yang ada dan seberapa efisien serta efektifnya peran pemerintah daerah.

Dengan demikian permasalahan yang akan dibahas adalah penaksiran besarnya potensi retribusi pasar pada tahun 2001, tingkat efisiensi penerimaan retribusi pasar pada tahun 1997 – 2001, efektivitas retribusi pasar pada tahun 1997 – 2001, pertumbuhan penerimaan retribusi daerah dan retribusi pasar pada tahun 1996 - 2001, serta kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Cilacap untuk tahun 1996 - 2001.

1.2 Perumusan Masalah

- a. Seberapa besar potensi retribusi pasar tahun 2001 di Kabupaten Cilacap.
- b. Seberapa besar tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar dari tahun 1996-2001 yang ada di Kabupaten Cilacap.
- c. Seberapa besar tingkat pertumbuhan retribusi daerah dan pasar dari tahun 1997-2001 yang ada di Kabupaten Cilacap.
- d. Seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 1996-2001 yang ada di Kabupaten Cilacap.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis potensi retribusi pasar yang ada di Kabupaten Cilacap.
- b. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar dari tahun 1996-2001 yang ada di Kabupaten Cilacap.
- c. Untuk menganalisis tingkat pertumbuhan retribusi daerah dan retribusi pasar dari tahun 1997-2001 yang ada di Kabupaten Cilacap.
- d. Untuk menganalisis kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 1996-2001 yang ada di Kabupaten Cilacap.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan berguna menambah perbendaharaan penelitian yang telah ada dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Dengan Penelitian ini diharapkan pembaca dapat mengetahui seberapa efektif dan efisien retribusi pasar yang ada di Kabupaten Cilacap, serta seberapa besar pertumbuhan dan potensi retribusi pasar, sehingga dapat menjadi bahan guna mengambil kebijakan-kebijakan yang ada di kabupaten Cilacap khususnya mengenai retribusi pasar.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN CILACAP

Menguraikan tentang tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap, perkembangan retribusi pasar, perkembangan biaya pemungutan retribusi pasar, jumlah pasar dan pedagang di Kabupaten Cilacap.

BAB III KAJIAN PUSTAKA

Menguraikan gambaran penelitian yang dilakukan sebelumnya untuk melandasi teori penelitian

BAB IV LANDASAN TEORI

Landasan teori atau konsep yang sesuai untuk melandasi penelitian.

BAB V METODE PENELITIAN

Berisi tentang Metode pengumpulan data, Obyek penelitian, Metode analisis dengan perhitungan Cost of Collection Efficiency Ratio (CCER) Charge Performance Index (CPI), analisis potensi, analisis pertumbuhan dan kontribusi.

BAB VI ANALISA DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskripsi data dan analisa serta pembahasan tentang perhitungan Cost of Collection Efficiency Ratio (CCER), Charge Performance Index (CPI), dan analisis potensi, analisis pertumbuhan dan kontribusi.

BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari skripsi dan berisi kesimpulan dan saran yang sesuai dengan analisa dari penelitian.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN RETRIBUSI PASAR
DI KABUPATEN CILACAP

2.1 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam pembangunan suatu daerah. Dengan pendidikan yang berkualitas dapat mencetak sumber daya manusia yang mampu berkompetisi dan bersaing. Kabupaten Cilacap memiliki sumber daya manusia yang cukup berkualitas dan kompetitif. Seperti terlihat pada tabel 2.2., tingkat pendidikan tamatan Sekolah Dasar pada tahun 1995 sebesar 212.983 dan semakin bertambah hingga sebesar 302.251 pada tahun 2001. Begitu pula yang terjadi pada tingkat pendidikan SMP pada tahun 1995 sebesar 299.918 mengalami peningkatan hingga sebesar 405.872 pada tahun 2001, dan semua perkembangan tersebut tak lepas dari adanya program dari pemerintah yang mewajibkan belajar selama 9 tahun.

Tingkat pendidikan yang ada di Kabupaten Cilacap dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang cukup positif. Pada tahun 2001 pendidikan yang bertamatan SMU sebesar 565.234, yang sebelumnya pada tahun 1995 sebesar 390.892. Kenaikan ini disebabkan pola berpikir masyarakat yang telah berubah, masyarakat lebih memilih pendidikan karena dengan pendidikan dapat menjamin masa depan yang lebih baik. Pada pendidikan yang bertamatan Diploma maupun Sarjana pada tahun 2001 sebesar 115.281 yang sebelumnya pada tahun 1995 sebesar 69.110, peningkatan dapat dikatakan cukup baik, mengingat biaya

pendidikan Diploma maupun Sarjana tidaklah murah. Perkembangan tingkat pendidikan dan kenaikannya Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini :

Tabel 2.1
Tingkat Pendidikan Kabupaten Cilacap
Tahun 1995 - 2001

Tahun	Tidak / Blm tamat SD	Sekolah Dasar	SMP	SMU	Diploma / Sarjana
1995	209.122	212.983	299.918	390.892	69.110
1996	211.409	221.877	305.021	421.560	73.751
1997	227.019	249.962	323.735	458.117	79.402
1998	242.451	269.525	354.102	486.461	84.210
1999	267.224	282.471	387.529	502.372	90.102
2000	275.121	298.632	399.713	529.751	98.979
2001	280.763	302.251	405.872	565.234	115.281

Sumber : BPS, Cilacap Dalam Angka berbagai terbitan

2.2 Perekonomian di Kabupaten Cilacap

Perekonomian Kabupaten Cilacap pada tahun 1995 – 2001 mengalami perkembangan yang relatif baik, seperti pada tahun 1995 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap sebesar 1,12 %, angka ini dikatakan relatif kecil untuk Kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, dan angka tersebut masih dibawah rata – rata target pemerintah Kabupaten Cilacap yang memproyeksikan 3 % untuk tahun tersebut. Memasuki tahun 1996 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dikarenakan ditingkatkannya pengelolaan sektor pariwisata, sehingga mencapai angka 2,36 %.

Tetapi pada tahun 1997 terjadi krisis yang membuat Indonesia terpuruk hampir semua sektor. Dengan tingginya nilai tukar US dollar terhadap rupiah, merupakan keuntungan bagi sektor pariwisata yang diharapkan banyak menarik wisatawan mancanegara. Tetapi kenyataannya belum sesuai harapan, masih banyak kerusuhan yang terjadi sehingga minat wisatawan masih kurang.

Pada tahun 1997 merupakan masa perekonomian yang sulit bagi Kabupaten Cilacap. Krisis yang menimpa negara ini membuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap menunjukkan nilai yang negatif sebesar -5,05 % jauh dari target pemerintah daerah Cilacap yaitu 3 % pertahun. Sehingga membuat perekonomian Kabupaten Cilacap terpuruk dan mengalami masa yang sulit dan penuh kegelapan.

Indikator mengukur keberhasilan pembangunan diantaranya dengan melihat perkembangan PDRB perkapita. Data mengenai PDRB dan pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 1993 Kabupaten CILACAP
(Dalam Ribuan Rupiah)

TAHUN	PDRB	PERTUMBUHAN (%)
1995	3.288.528,35	1,1237
1996	3.404.264,46	2,3690
1997	3.232.032,35	- 5,0593
1998	3.590.194,76	11,0816
1999	3.709.197,11	3,3146
2000	3.876.275,43	4,5044
2001	4.124.566,25	6,4053

Sumber : BPS, Cilacap Dalam Angka berbagai terbitan

Setelah pada tahun 1997 mengalami keterpurukkan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan yang relatif besar yaitu sebesar 11,08 %. Kenaikan ini tentu tak lepas dari peran industri besar dan menengah khususnya industri pengekspor yang diuntungkan dengan adanya krisis. Pengeksporan meliputi pengkalengan ikan, udang, dan ubur – ubur, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat.

Dengan semakin membaiknya perekonomian Indonesia dan semakin stabilnya nilai tukar rupiah terhadap US dolar maka berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap. Seperti pada tahun 1999 sebesar 3,3 %, tahun 2000 sebesar 4,5 % dan tahun 2001 sebesar 6,4 %. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap mengalami pertumbuhan yang relatif stabil, akan tetapi masih terlalu kecil sehingga perlu tingkatannya mutu sumber daya manusia dan memanfaatkan sumber daya alam yang belum tergali. Dengan SDA dan SDM yang berkualitas dapat memperlancar pembangunan daerah Kabupaten Cilacap.

2.3 Perkembangan retribusi pasar Kabupaten Cilacap

Penerimaan retribusi pasar Kabupaten Cilacap dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup baik. Bila dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Retribusi Daerah dan Retribusi Pasar
Kabupaten Cilacap Tahun 1996 – 2001
(Dalam Rupiah)

TAHUN	RETRIBUSI DAERAH	RETRIBUSI PASAR	PERSEN (%)
1996	4.583.433.000	759.406.166	16,56
1997	6.165.092.000	1.002.798.854	16,26
1998	4.884.553.370	990.132.102	20,27
1999	6.678.370.929	1.037.602.910	15,53
2000	5.659.323.692	1.245.016.755	21,99
2001	10.232.910.243	1.592.306.564	15,56

Sumber : CILACAP Dalam Angka, BPS CILACAP

Perkembangan retribusi pasar Kabupaten Cilacap cenderung naik, bila dipersentasekan pada tahun 1996 sebesar 16,56 %, tahun 1997 sebesar 16,26 %, tahun 1998 sebesar 20,27 %, tahun 1999 sebesar 15,53 %, tahun 2000 sebesar 21,99 %, tahun 2001 sebesar 15,56 %. Tingkat kenaikan tertinggi pada tahun 2000 dan tingkat terendah pada tahun 1999. Perkembangan ini cukup baik guna menambah retribusi yang ada akan tetapi perlu dikembangkan kembali potensi – potensi yang belum tergali, ini merupakan tugas pemerintah daerah guna memajukan dan membangun daerah.

2.3.1 Biaya pemungutan retribusi pasar

Kabupaten Cilacap memiliki biaya – biaya yang berhubungan dengan penarikan retribusi pasar dan sering disebut dengan biaya pemungutan retribusi pasar. Biaya pemungutan retribusi selama tahun 1996 – 2001 mengalami perkembangan yang naik – turun sesuai dengan keadaan yang terjadi pada tahun tersebut. Biaya tersebut merupakan biaya – biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan proses penerimaan retribusi pasar, yang terdiri dari upah pungut, biaya – biaya operasional yang terdiri dari kebutuhan biaya cetak karcis, biaya

pengelolaan, biaya alat tulis kantor, dan biaya pemeliharaan kantor, dan gaji pegawai. Perkembangan biaya pemungutan retribusi pasar selama tahun 1996 – 2001 dapat dilihat pada 2.4.

Tabel 2.4
Biaya Pemungutan Retribusi Pasar
Kabupaten Cilacap Tahun 1996 – 2001
(Dalam Rupiah)

TAHUN	UPAH PUNGUT	BIAYA OPERASIONAL	GAJI TUNGGAKAN
1996	37.970.308	77.279.692	298.248.000
1997	50.139.943	232.150.057	325.090.000
1998	49.506.605	243.493.395	325.090.000
1999	51.880.146	336.831.854	751.344.000
2000	50.050.838	227.212.162	588.760.000
2001	52.256.134	395.874.253	520.324.000

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap

Dari semua biaya tersebut bila dijumlah merupakan biaya pemungutan retribusi pasar, dengan biaya – biaya tersebut pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan yang harus diambil di periode tahun berikutnya sehingga dapat memperlancar proses penerimaan retribusi pasar.

2.4 Jumlah Pasar Dan Jumlah Pedagang

2.4.1 Jumlah pasar

Pasar yang ada di Kabupaten Cilacap sebanyak 31 pasar, yang terbagi menjadi beberapa kelas – kelas tertentu. Yang memiliki sifat – sifat tertentu yang terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Sifat pasar yang ditinjau dari jenis barang
 1. Pasar umum adalah pasar dengan jenis dagangan yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan dengan secara seimbang minimal tersedia pemenuhan kebutuhan sehari –hari.
 2. Pasar khusus adalah pasar dengan dagangan yang diperjual belikan sebagian besar terdiri dari satu jenis dagangan beserta kelengkapannya.
- b. Sifat pasar ditinjau dari klasifikasinya
 1. Pasar kelas satu adalah dengan komponen bangunan yang lengkap, sistem arus barang dan orang, baik dalam maupun luar bangunan dan melayani perdagangan tingkat regional.
 2. Pasar kelas dua adalah dengan komponen bangunan yang lengkap, sistem arus barang dan orang, baik dalam maupun luar bangunan dan melayani perdagangan tingkat kota.
 3. Pasar kelas tiga adalah dengan komponen bangunan yang lengkap, sistem arus barang dan orang, baik dalam maupun luar bangunan dan melayani perdagangan tingkat wilayah bagian kota.

Kabupaten Cilacap memiliki pasar yang tesebar hampir disetiap kecamatan. Dari pasar yang berada di kota sampai wilayah bagian kota, seperti terlihat pada tabel 2.4 yang menggambarkan pasar menurut kelas – kelasnya.

2.4.2 Jumlah Pedagang

Pedagang – pedagang yang ada di Kabupaten Cilacap sebagian besar adalah warga Cilacap. Seperti terlihat pada tabel 2.4 jumlah pedagang dibagi menjadi tiga macam yaitu ; pedagang kios, los dan plataran. Bila dilihat dari total pedagang yang ada, pedagang plataran lebih banyak jumlahnya dikarenakan biaya retribusi lebih murah dan tidak adanya sewa yang mengikat para pedagang. Pada tahun 2001 terdapat pedagang kios yang berjumlah 1276, pedagang los 5545 dan pedagang plataran 5883.

Tabel 2.5
Nama Pasar dan Jumlah Pedagang Kabupaten Cilacap
Tahun 2001

NO	Nama pasar	Jumlah Pedagang			
		Pasar Kelas I	Kios	Los	Plataran
1	Gede		217	510	702
2	Sidodadi		69	206	225
3	Kroya		186	660	325
4	Sampang		56	292	250
5	Gandrungmangu		75	354	322
6	Majenang		115	701	490
	Pasar Kelas II				
7	Adipala		63	275	28
8	Sidareja		44	274	194
9	Kawunganten		31	359	235
10	Lebeng		19	216	254
11	Wanareja		78	121	137
12	Cipari		18	123	413
13	Kesugihan		26	186	180
14	Ikan(PPC)		89	98	-
15	Tanjung Sari		32	126	69
16	Saliwangi		31	95	234
17	Sentolo Hewan		-	-	92
18	Palemgading		24	16	-
	Pasar Kelas III				
19	Gumilir		22	27	-
20	Maos kidul		11	170	163
21	Binangun		18	83	217
22	Kemojing		5	153	133
23	Karangputat		7	36	116
24	Sarwodadi		2	30	60
25	Nusawungu		10	36	126
26	Sentolo umum		18	16	92
27	Panimbang		10	102	323
28	Karang kandri		-	162	314
29	Sikampuh		-	15	12
30	Klumprit		-	20	60
31	Banjareja		-	83	117
	Total		1276	5545	5883

Sumber : Dinas Pendapatan daerah Kabupaten Cilacap tahun 2001

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

3.1 Kajian pustaka

Penelitian mengenai konsep retribusi pasar telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Hasil – hasil penelitian tersebut memiliki spesifikasi sendiri – sendiri karena disamping lokasi dan waktunya berbeda, variabel – variabel penelitian yang diamati juga yang tidak sama.

3.1.1 Abdurrahim Marsaoly

Dalam tesisnya yang berjudul ” potensi, efisiensi, efektifitas dan kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Ternate ”, penulis mendapat kesimpulan bahwa potensi retribusi pasar kota Ternate pada tahun 2001 adalah Rp 613.000,00, sedangkan target dan realisasi dari penerimaan retribusi pasar pada tahun tersebut adalah Rp 411.900.000,00 atau 67,10 % dan Rp 416.821.750,00 atau 67,90 % dari potensinya. Dengan demikian selisih antara target dan realisasi sebesar Rp 196.978.250,00 atau 32,10 % dari potensinya.

Penetapan target selama 5 tahun terakhir yaitu tahun 1997 – 2001 rata – rata baru mencapai 70,29 % dan realisasi sebesar 70,63 % dari potensi sebenarnya karena penetapan target selama ini tidak berdasarkan pada data yang akurat, namun berdasarkan penambahan sekian persen dari target tahun sebelumnya, masih banyak penjual / pedagang yang kurang tertib dalam membayar kewajibannya disamping karena adanya penyimpangan dalam pemungutan retribusi pasar.

3.1.2 Arief Sudaryanto

Pada tesisnya yang berjudul " peranannya retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah dan potensinya di kabupaten Demak ", penulis mendapatkan hasil bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Demak rata – rata sebesar 11,16 % artinya bahwa dari seluruh pendapatan daerah 11,16 % nya adalah bersumber dari retribusi pasar.

Sedangkan potensi retribusi pasar kabupaten Demak tahun 2000 adalah sebesar Rp 2.168.814.476,00, dan tingkat efisiensi pemungutan retribusi pasar kabupaten Demak selama tahun 1995 – 2000 sebesar 26,39 %. Ini berarti bahwa untuk menghasilkan penerimaan retribusi pasar Rp 100,00 dikeluarkan biaya sebesar Rp 26,39 dan tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar adalah 32,51 %.

3.1.3 Bagus Santoso

Dalam penelitiannya yang berjudul " retribusi pasar sebagai pendapatan asli daerah di kabupaten Sleman ", peneliti mencatat bahwa di kabupaten Sleman pangsa penerimaan retribusi daerah sebesar 9,4 % pada tahun anggaran 1988 / 1989 dan turun menjadi 7,1 % pada tahun anggaran 1991 / 1992. Dari seluruh Penerimaan daerah, sebagian besar penerimaan daerah berasal dari retribusi rumah sakit dan pasar. Persentase penerimaan daerah berasal dari retribusi rumah sakit dari seluruh penerimaan retribusi daerah menurun dari 28,92 % tahun anggaran 1988 / 1989 menjadi 26,72 % pada tahun anggaran 1991 / 1992. Penelitian di lapangan mengindikasikan bahwa realisasi penerimaan retribusi

pasar baru mencapai sekitar 48,8 % dari potensinya. Selain itu Santoso menambahkan bahwa kesediaan para pedagang membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar. Bila pasar ramai dan banyak pembeli, maka omset dan keuntungan penjualan harian akan menjadi lebih besar dan kesadaran pedagang untuk membayar retribusi secara penuh juga akan meningkat. Minat pembeli untuk berbelanja dipasar, kelengkapan jenis barang dagangan dipasar, serta kenyamanan berbelanja, dengan demikian upaya peningkatan kesediaan membayar retribusi pasar masih dapat ditingkatkan apabila diimbangi dengan peningkatan fasilitas baik bagi konsumen maupun pedagang.

3.1.4 Dudi Mi'raz Imaduddin

Berdasarkan hasil tesisnya yang berjudul " potensi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Depok ", didapatkan beberapa kesimpulan yaitu kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Depok selama tahun 1999 – 2001 adalah sebesar 1,24 %, sedangkan pada kontribusi terhadap retribusi daerah adalah 3,2 %. Peranan kontribusi ini masih relatif kecil sehingga tidak cukup menunjang Pendapatan Asli Daerah. Adapun tingkat pertumbuhan penerimaan retribusi pasar di kota Depok untuk tahun 1999 – 2000 adalah cukup berfluktuatif rata – rata pertahunnya 77,07 %. Tingkat pertumbuhan tertinggi pada tahun 2001 yaitu sebesar 76,09 %.

Selain itu potensi penerimaan retribusi pasar tahun 2002 lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp 538.784.640,00 sedangkan potensinya sebesar Rp 577.425.500,00. Variabel untuk menghitung adalah jumlah

penerimaan dari kios los, plataran, radius 300 M dan fasilitas MCK dikalikan tarif. Sedangkan rata – rata efektivitas pemungutan retribusi pasar adalah 65,72 % dan tingkat efisiensi rata – rata 46,57 %.

3.1.5 Muhammad Aji Wibowo

Menurut tesisnya yang berjudul ” efisiensi, efektifitas, pertumbuhan dan proyeksi retribusi pasar di kabupaten Sleman ”, menunjukkan hasil bahwa tingkat efisiensi dari pemungutan retribusi pasar rata – rata 44,99 %. Dan tingkat efektivitas rata – rata 83,91 %, dimana menunjukkan tingkat efektivitas yang efektif. Sedangkan untuk pertumbuhan penerimaan retribusi pasar untuk tahun 1996 – 1999 adalah 35,19 %, 33,83 %, 8,48 %, 0,07 %. Hal ini disebabkan karena minimnya pembayaran penambahan fasilitas pasar di kabupaten Sleman dan juga sebagai akibat dari tidak adanya anggaran pembangunan fisik.

3.1.6 Soemardji

Dalam tesisnya yang berjudul ”Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pasar Berdasarkan Potensi di kabupaten Sorong”, yang menganalisis tentang tingkat efisiensi dan efektifitas pemungutan pasar berdasarkan potensi di kabupaten Sorong. Disimpulkan bahwa dikabupaten Sorong pemungutan retribusi pasar selama kurun waktu 1994 / 1995 sampai dengan 1998 / 1999 memiliki tingkat efisiensi yang cukup baik yaitu merata pertahunnya sebesar 22,78 % artinya untuk merealisasikan penerimaan sebesar RP 100,00 dibutuhkan biaya sebesar RP 22,78 tingkat efektifitas pungutan retribusi pasar juga cukup baik, yang di tunjukkan oleh perbandingan hasil pungutan dengan potensi yang ada pada tahun anggaran 1998 / 1999 sebesar 87,33 %.

BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1 Landasan Teori

4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan untuk mewujudkan suatu daerah dalam menghimpun sumber – sumber dana guna membiayai kegiatan – kegiatan baik rutin maupun pembangunan. Jadi dapat dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan rutin dari usaha – usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi – potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawab.

4.1.2 Sumber – Sumber Pendapatan Daerah

Faktor keuangan merupakan faktor yang esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Keadaan keuangan daerah yang menentukan bentuk dan ragam kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Menurut Undang – Undang No 22 tahun 1999, sumber - sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 1. Hasil pajak daerah
 2. Hasil retribusi daerah

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
4. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah ;
 - b. Dana perimbangan
 - c. Pinjaman daerah ; dan
 - d. Lain – lain pendapatan daerah yan sah

Dari sejumlah pendapatan daerah tersebut diatas, upaya penghimpunan yang paling diutamakan adalah pada pendapatan asli daerah (PAD) mengingat PAD adalah sumber yang sering dijadikan sebagai ukuran kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

4.1.3 Retribusi Daerah

Menurut Undang – Undang No 34 tahun 2000, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dalam atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah pemungut retribusi. Pada intinya retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang dapat ditunjuk.

4.1.3.1. Fungsi Retribusi Daerah

Adalah sebagai penerimaan dan pengatur. Fungsi penerimaan merupakan fungsi pokok retribusi, artinya dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan dana bagi pemerintah daerah, terutama yang menyangkut penyediaan jasa dan pelayanan kepada masyarakat. Pembayaran retribusi dipakai sebagai perangkat lunak untuk menata perekonomian.

Karena retribusi merupakan alat pengatur ekonomi dan sosial maka retribusi daerah di harapkan dapat mendorong kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemungutan retribusi harus dapat memenuhi syarat bahwa :

- a. Retribusi daerah tidak boleh menjadi penghalang bagi masuk keluarnya pengangkutan barang dalam suatu daerah. Maksudnya pengutan retribusi jangan sampai memberatkan biaya retribusi. Jadi untuk barang yang datang ataupun yang keluar jangan sampai dikenakan retribusi yang tinggi sehingga tidak menjadi suatu penghambat masuk atau keluarnya barang. Apabila arus barang terhambat maka akan mempengaruhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Dalam pengaturan retribusi daerah tidak diadakan perbedaan dan pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan golongan dan keagamaan. Ketentuan ini bermaksud bahwa retribusi bersifat netral dan tidak diskriminatif. Semua masyarakat memanfaatkan jasa yang sama dari pemerintah daerah.

4.1.3.2.Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah

Secara umum retribusi daerah dipungut berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No 34 tahun 2000 tentang pajak daerah. Retribusi daerah untuk tiap – tiap daerah pemungutan di kenakan berdasarkan peraturan daerah masing – masing daerah yang dipungut retribusinya. Peraturan daerah tersebut dapat berlaku bila telah mendapatkan pengesahan. Untuk retribusi daerah Propinsi harus disahkan oleh Presiden yang sebelumnya disetujui oleh DPRD.

4.1.3.3.Golongan, Objek, Jenis dan Subyek Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2001, Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu;

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
 - a. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 - b. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 6. Retribusi Pelayanan Pasar;
 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
- c. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- a. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
 - b. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan;
 3. Retribusi Tempat Pelelangan;
 4. Retribusi Terminal;
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

6. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa;
 7. Retribusi Penyedotan Kakus;
 8. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
 10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air;
 12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- c. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- a. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

b. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek.

c. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

4.1.3.4. Penghitungan dan pelaksanaan pemungutan retribusi

1. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.
2. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
3. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

4. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
5. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
6. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - a. Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi tersebut oleh instansi yang bersangkutan.
 - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan penerimaan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4.1.4. Retribusi Pasar

Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan bagi mereka yang menggunakan tempat dasaran maupun tidak yang terdapat pada pasar. Dan juga pungutan atas penyediaan jasa fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa plataran, los, kios yang disediakan untuk setiap pedagang. Karena retribusi pasar untuk setiap daerah berbeda maka peraturan – peraturan yang dituangkan pasti berbeda. Peraturan dan tarif serta sanksi dapat disesuaikan dengan situasi daerah.

4.1.4.1. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pasar

Retribusi pasar dipungut berdasarkan peraturan daerah pemungut, peraturan daerah tersebut dibuat berdasarkan UU No 34 Tahun 2000 tentang

retribusi daerah. Oleh karena itu untuk setiap daerah pemungutan terdapat peraturan yang mengatur pemungutan retribusi maka ketentuannya dapat berbeda satu dengan yang lainnya.

Kabupaten Cilacap memiliki Peraturan Daerah No 11 Tahun 1995 yang berisi tentang pemungutan retribusi pasar. Dan kemudian menurut Keputusan Bupati No 2 tahun 2000 tentang tarif persewaan tempat dasaran didalam dan diluar los pasar dalam Kabupaten Cilacap.

4.1.4.2 Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi Pasar

1. Obyek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa kios / plataran / los yang dikelola oleh pemerintah daerah yang khusus disediakan untuk pedagang.
2. Subyek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / memanfaatkan / menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar.
3. Wajib retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

4.1.4.3. Tarif dan Perijinan Retribusi Pasar

Penetapan tarif retribusi pasar dipengaruhi oleh :

1. Sifat pasar ditinjau dari jenis dagangan.
2. Sifat pasar ditinjau dari klasifikasi.

3. Penggolongan jenis dagangan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 02 tahun 2000 tentang tarif persewaan kios dan persewaan tempat dasaran didalam dan diluar los pasar dalam wilayah Kabupaten Cilacap, yang terdiri dari 31 pasar yang tersebar diseluruh kecamatan dengan klasifikasi pasar kelas I, II, III. Dengan adanya pengelompokan ini akan berpengaruh besar terhadap tarif yang dikenakan, baik tarif sewa kios, los, plataran, tanah dan perijinan. Adapun tarif retribusi pasar untuk tahun 2001 adalah :

1. Tarif kios retribusi pasar
 - a. Pasar kelas I
 - Depan sebesar Rp 150,00 / meter / tahun
 - Dalam sebesar Rp 135,00 / meter / tahun
 - b. Pasar kelas II
 - Depan sebesar Rp 120,00 / meter / tahun
 - Dalam sebesar Rp 110,00 / meter / tahun
 - c. Pasar kelas III
 - Depan sebesar Rp 90,00 / meter / tahun
 - Dalam sebesar Rp 0,00 / meter / tahun
2. Tarif los retribusi pasar
 - a. Pasar kelas I sebesar Rp 150,00 / meter / tahun
 - b. Pasar kelas II sebesar Rp 90,00 / meter / tahun
 - c. Pasar kelas III sebesar Rp 67,5 / meter / tahun

3. Tarif plataran retribusi pasar
 - a. Pasar kelas I sebesar Rp 250,00 / meter / tahun
 - b. Pasar kelas II sebesar Rp 200,00 / meter / tahun
 - c. Pasar kelas III sebesar Rp 150,00 / meter / tahun
4. Tarif hewan kecil retribusi pasar untuk setiap pasar sebesar Rp 250,00
5. Perijinan kios retribusi pasar
 - a. Pasar kelas I sebesar Rp 15.000,00 / tahun
 - b. Pasar kelas II sebesar Rp 12.000,00 / tahun
 - c. Pasar kelas III sebesar Rp 9.000,00/ tahun
6. Perijinan los pasar
 - a. Pasar kelas I sebesar Rp 5.000,00 / tahun
 - b. Pasar kelas II sebesar Rp 4.000,00 / tahun
 - c. Pasar kelas III sebesar Rp 9.000,00/ tahun
7. Tarif sewa tanah
 - a. Pasar kelas I
 - Kios depan sebesar Rp 2500,00 / meter / tahun
 - Kios dalam sebesar Rp 2000,00 / meter / tahun
 - b. Pasar kelas II
 - Kios depan sebesar Rp 1500,00 / meter / tahun
 - Kios dalam sebesar Rp 1000,00 / meter / tahun
 - c. Pasar kelas III
 - Kios depan sebesar Rp 1500,00 / meter / tahun
 - Kios dalam sebesar Rp 1000,00 / meter / tahun

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Metode pengumpulan data

Dalam rangka mencapai sasaran studi maka jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh antara lain dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari berbagai terbitan dan dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Cilacap. Dan dengan cara *Library research* yaitu mengumpulkan data-data sekunder yang dibutuhkan guna penelitian penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku literatur, dokumen, dan referensi lainnya.

5.2 Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini terdiri dari penerimaan retribusi pasar Kabupaten Cilacap, biaya pemungutan pasar, target dan realisasi penerimaan retribusi pasar dan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios / pelataran / los yang dikelola pemerintah daerah yang disediakan untuk para pedagang untuk Daerah Kabupaten Cilacap.

5.3 Metode Analisis

5.3.1. Analisis Efisiensi

Efisiensi digunakan untuk mengukur bagian dan hasil pajak atau retribusi yang digunakan menutupi biaya pemungutan pajak atau retribusi yang ada.

Perhitungan efisiensi dapat dilakukan dengan metode *Cost of Collection Efficiency Ratio (CCER)* yaitu dengan membandingkan antara biaya pemungutan retribusi pasar dengan realisasi penerimaan retribusi pasar.²

$$\text{CCER} = \frac{\text{Biaya Pemungutan retribusi}}{\text{Realisasi Penerimaan retribusi}} \times 100 \%$$

5.3.2. Analisis Efektivitas

Analisis ini digunakan untuk mengetahui proporsi realisasi penerimaan retribusi pasar terhadap target yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah Charge Performance Index (CPI). Dan bila di formulasikan dalam rumus maka:³

$$\text{CPI} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan retribusi}}{\text{Target retribusi pasar}} \times 100 \%$$

Dalam perhitungan efektivitas apabila hasilnya menunjukkan persentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pengelolaan retribusi pasar semakin efektif dan sangat efektif bila mencapai seratus persen. Demikian pula sebaliknya semakin kecil persentase hasilnya menunjukkan pengelolaan retribusi pasar semakin tidak efektif. Adapun kriteria efektivitas dan efisiensi adalah sebagai berikut :⁴

² Dudi Mi'raz Imaduddin, Potensi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Depok, Tesis S2 PPS MEP UGM, 2002

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Tabel 5.1
Kriteria efektivitas dan efisiensi kinerja

Persentase Kinerja	Kriteria	
	Efektivitas	Efisiensi
> 100 %	Sangat efektif	Tidak efisien
90 – 100 %	Efektif	Kurang efisien
80 – 90 %	Cukup efektif	Cukup efisien
60 – 80 %	Kurang efektif	Efisien
< 60 %	Tidak efektif	Sangat efisien

5.3.3. Potensi retribusi pasar

Untuk mengetahui penerimaan retribusi pasar maka dapat dilihat dari beberapa item penerimaan yaitu berupa : jumlah kios, los, dan pedagang lesehan yang berdagang. Dan yang menjadi sampel penelitian adalah jumlah pedagang keseluruhan, hari pasar, jumlah pedagang pada saat ramai maupun saat sepi, jumlah hewan kecil, jumlah hewan besar, rata-rata retribusi yang dikenakan untuk setiap pedagang dan penerimaan retribusi setiap bulannya.

Berdasarkan data yang telah ada maka diperoleh formulasi perhitungan sebagai berikut :⁵

$$Pr = (\sum lk \times rk \times hp) + (\sum ll \times rl \times hp) + (\sum ls \times rp \times hp) +$$

$$(\sum lk \times rs \times hp) + (\sum hk \times rhk \times hp) + (\sum ls \times ik) + (\sum ls \times il)$$

Pr = Potensi retribusi pasar

lk = Luas kios

ll = Luas los

ls = Jumlah pedagang

⁵ Mardiasmo dan Makl.fatih, Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang, Laporan Akhir PPS MEP UGM, 2000

hk	= Jumlah pedagang hewan kecil
rk	= Tarif retribusi kios
rl	= Tarif retribusi los
rp	= Tarif retribusi plataran
rs	= Tarif retribusi sewa tanah
rhk	= Tarif retribusi hewan kecil
ik	= Ijin kios
il	= Ijin los
hp	= Hari pasaran yang jumlahnya bervariasi yaitu 72 hari, 104 hari, dan 360 hari

5.3.4. Analisis Pertumbuhan

Analisis ini berguna untuk mengukur tingkat pertumbuhan dari jenis-jenis penerimaan daerah yaitu retribusi pasar dan retribusi daerah.⁶

1. Pertumbuhan retribusi daerah

$$\Delta RD_t = \frac{RD_t - RD_{t-1}}{RD_{t-1}} \times 100\%$$

ΔRD_t = Laju pertumbuhan retribusi daerah

RD = Retribusi daerah

t = Tahun tertentu

t-1 = Tahun sebelumnya

2. Pertumbuhan retribusi pasar⁷

⁶Widodo Suseno, Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 1990

⁷ *Ibid.*

$$\Delta RP_t = \frac{RP_t - RP_{t-1}}{RP_{t-1}} \times 100\%$$

ΔRP_t = Laju pertumbuhan retribusi pasar

RP = Retribusi pasar

t = Tahun tertentu

t-1 = Tahun sebelumnya

5.3.5. Kontribusi

Analisis ini digunakan untuk menghitung kontribusi pasar terhadap terhadap Pendapatan Asli Daerah. Yaitu dengan membandingkan antara pencapaian atau realisasi penerimaan retribusi pasar dengan pencapaian atau realisasi Pendapatan Asli Daerah kemudian dikalikan 100 %.⁸

$$P = \frac{X_i}{X} \times 100 \%$$

P = Kontribusi

X_i = Penerimaan retribusi pasar

X = Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

⁸ Dudi Mi'raz Imaduddin, Potensi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Depok, Tesis S2 PPS MEP UGM, 2002

BAB VI

DATA DAN ANALISIS DATA

6.1 DATA

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai penertiban " Cilacap Dalam Angka " oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap dari tahun 1996 – 2001, dan Dispenda Kabupaten Cilacap tahun 1996 – 2001. Data yang digunakan adalah luas lahan kios, luas lahan los, jumlah pedagang plataran, dan kelas pasar yang berada dalam daerah Kabupaten Cilacap. Selain itu data yang dipakai dalam penelitian adalah data target dan realisasi retribusi pasar, data penerimaan retribusi daerah dan PAD, serta data tarif dan biaya pemungutan retribusi pasar.

6.1.1 Luas Lahan Kios

Data Luas lahan kios adalah data yang berisi tentang luas lahan yang berupa kios dari masing – masing pasar yang diperoleh dari Dispenda Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2001.

6.1.2 Luas Lahan los

Data Luas lahan los adalah data yang berisi tentang luas lahan usaha los dari masing – masing pasar yang diperoleh dari Dispenda Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2001.

6.1.3 Jumlah Pedagang Plataran

Data jumlah pedagang adalah data yang berisi tentang jumlah pedagang yang berjualan diluar kios dan los yang telah disediakan pasar dan diperoleh dari Dispenda Kabupaten Cilacap untuk tahun anggaran 2001.

6.1.4 Kelas Pasar

Pasar merupakan tempat yang digunakan oleh pedagang untuk mengadakan transaksi jual beli. Kelas pasar adalah penggolongan pasar dalam kelas tertentu berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan, di Kabupaten Cilacap terdapat 3 jenis kelas pasar dan data tersebut diperoleh dari Dispenda Kabupaten Cilacap untuk tahun anggaran 2001.

6.1.5 Target dan Realisasi Retribusi Pasar

Data ini berisi tentang target retribusi pasar yang akan dicapai dengan realisasi yang sebenarnya terjadi, yang diperoleh dari " Cilacap Dalam Angka " yang diterbitkan Badan Pusat Statistik untuk periode tahun 1996 – 2001.

6.1.6 Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Data ini berisi tentang Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun, yang diperoleh dari " Cilacap Dalam Angka " yang diterbitkan Badan Pusat Statistik untuk periode tahun 1996 – 2001.

6.1.7 Tarif dan Biaya Pemungutan Retribusi Pasar

Data yang berisi tentang upah pungut, biaya operasional, dan gaji tunggakan dari tahun ke tahun, yang diperoleh dari "Cilacap Dalam Angka" yang diterbitkan Badan Pusat Statistik untuk periode tahun 1996 -- 2001.

6.2 ANALISIS DATA

6.2.1 Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Cilacap Tahun 2001

Penerimaan retribusi pasar Kabupaten Cilacap memiliki potensi penerimaan yang dapat dihitung menggunakan model dan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 02 tahun 2000 tentang tarif persewaan kios dan persewaan tempat dasaran didalam dan diluar los pasar dalam wilayah Kabupaten Cilacap, yang terdiri dari 31 pasar yang tersebar diseluruh kecamatan dengan klasifikasi pasar kelas I, II, III. Dengan adanya pengelompokan ini akan berpengaruh besar terhadap tarif yang dikenakan, baik tarif sewa kios, los, plataran, dan perijinan maupun perijinan. Penghitungan potensi retribusi pasar Kabupaten Cilacap tahun 2001 dapat menggunakan model seperti berikut :⁹

$$Pr = (\sum lk \times rk \times hp) + (\sum ll \times rl \times hp) + (\sum ls \times rp \times hp) + (\sum lk \times rs \times hp) + (\sum hk \times rhk \times hp) + (\sum ls \times ik) + (\sum ls \times il)$$

Pr = Potensi retribusi pasar

lk = Luas kios

⁹ Mardiasmo dan Makhfatih, *op.cit.*

ll	= Luas los
ls	= Jumlah pedagang
hk	= Jumlah pedagang hewan kecil
rk	= Tarif retribusi kios
rl	= Tarif retribusi los
rp	= Tarif retribusi plataran
rs	= Tarif retribusi sewa tanah
rhk	= Tarif retribusi hewan kecil
ik	= Ijin kios
il	= Ijin los
hp	= Hari pasaran yang jumlahnya bervariasi yaitu 72 hari, 104 hari, dan 360 hari

Dengan model tersebut dapat diperoleh potensi retribusi pasar pada tahun 2001 yaitu sebesar :

$$\begin{aligned}
 Pr &= \text{Rp } 741.275.172,00 + \text{Rp } 730.198.270,00 + \text{Rp } 113.006.850,00 + \\
 &\quad \text{Rp } 28.189.675,00 + \text{Rp } 12.354.000,00 + \text{Rp } 17.157.000,00 + \\
 &\quad \text{Rp } 23.970.000,00 \\
 &= \text{Rp } 1.666.150.967,00
 \end{aligned}$$

Perhitungan dengan model ini dapat dilihat pada lampiran, jadi dari perhitungan tersebut dapat diperoleh hasil bahwa potensi retribusi pasar di Kabupaten Cilacap tahun 2001 yaitu Rp 1.666.150.967,00. Jika potensi retribusi pasar tahun 2001 tersebut dibandingkan dengan target dan realisasi penerimaan retribusi pasar tahun 2001 maka dapat diperoleh sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Perbandingan Potensi dengan Target dan Realisasi
Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Cilacap Tahun 2001

Retribusi Pasar	Tahun 2001		
	Penerimaan	(%)	Selisih
Potensi	1.666.150.967		
Target	1.487.000.000	89,24	179.150.967
Realisasi	1.592.306.564	95,56	73.844.403

Jika dilihat pada tabel 6.1. maka dapat diambil kesimpulan bahwa target retribusi pasar yang besarnya Rp 1.487.000.000,00 memiliki persentase sebesar 89,24 % dari potensi retribusi pasar pada tahun 2001. Dan mempunyai selisih dengan sebesar Rp179.150.967,00, ini menandakan bahwa penentuan target retribusi masih belum maksimal dan adanya perbedaan perhitungan antara target retribusi pasar dengan potensi retribusi pasar sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Cilacap.

Realisasi penerimaan retribusi pasar tahun 2001 yaitu sebesar Rp 1.592.306.564,00 dan memiliki persentase sebesar 95,56 % dari potensi retribusi pasar pada tahun 2001 serta mempunyai selisih sebesar Rp 73.844.403,00. Dengan adanya selisih yang cukup besar maka dimungkinkan masih terdapat potensi retribusi pasar yang belum tergali dan dapat dikembangkan seperti perlunya pendataan pedagang yang lebih akurat karena jumlah pedagang tiap tahunnya diperkirakan akan selalu meningkat, selain itu perlu diadakan penertiban untuk para pedagang yang belum membayar retribusi pasar karena dengan semakin banyak pedagang yang tidak membayar akan mengurangi penerimaan retribusi pasar, dan perlunya peningkatan tarif yang dikenakan bagi

para pedagang karena tarif yang ada tidak terlalu besar guna memaksimalkan penerimaan retribusi pasar sehingga perlu dilakukan tarif yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan pasar dan juga keadaan para pedagang agar penerimaan retribusi pasar dapat meningkat. Adapun variabel – variabel yang digunakan adalah luas kios, luas los, jumlah pedagang, jumlah hewan kecil, perijinan jumlah hari pasaran dan tarif.

Bila dibandingkan antara potensi retribusi pasar Kabupaten Cilacap tahun 2001 dengan potensi penerimaan retribusi pasar tahun 2002 kota Depok yang besarnya Rp 577.425.500,00 dengan target yang telah ditetapkan Rp 538.784.640,00 yang memiliki variabel – variabel diantaranya jumlah penerimaan dari kios, los, plataran radius 30 M dan fasilitas MCK dikalikan tarif.¹⁰ Maka penerimaan retribusi pasar kabupaten Cilacap lebih besar yaitu sebesar Rp 1.666.150.967,00 kejadian ini dikarenakan adanya variabel – variabel yang berbeda dan juga luas serta jumlah pasar yang berbeda pada masing – masing daerah. Sehingga penerimaan potensi retribusi pasar untuk tiap – tiap daerah berbeda.

6.2.2 Efisiensi Pemungutan Retribusi Pasar

Efisiensi merupakan perbandingan atau rasio antara biaya pemungutan retribusi pasar dengan besarnya realisasi penerimaan retribusi pasar. Untuk menghitung efisiensi retribusi dibutuhkan biaya pemungutan retribusi pasar yang

¹⁰ Dudi Mi'raz Imaduddin, *op.cit*

diperoleh dari penjumlahan dari upah pungut, biaya operasional, dan gaji tunggakan. Maka dapat diperoleh perhitungan sebagai berikut :

Tabel 6.2.
Biaya Pemungutan Retribusi Pasar
Kabupaten Cilacap Tahun 1996 – 2001
(Dalam Rupiah)

TAHUN	UPAH PUNGUT	BIAYA OPERASIONAL	GAJI TUNGGAKAN	JUMLAH
1996	37.970.308	77.279.692	298.248.000	413.498.000
1997	50.139.943	232.150.057	325.090.000	607.380.000
1998	49.506.605	243.493.395	325.090.000	618.090.000
1999	51.880.146	336.831.854	751.344.000	1.140.056.000
2000	50.050.838	227.212.162	588.760.000	866.023.000
2001	52.256.134	395.874.253	520.324.000	968.454.387

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap

Setelah peroleh hasil perhitungan biaya pemungutan pasar kemudian dibagi dengan realisasi penerimaan retribusi pasar dan dikalikan 100 %. Maka dapat diperoleh hasil seperti berikut :

Tabel 6.3.
Efisiensi Retribusi Pasar
Kabupaten Cilacap Tahun 1996 – 2001
(Dalam Rupiah)

TAHUN	BIAYA	REALISASI	(%)
1996	413.498.000	759.406.166	54,450
1997	607.380.000	1.002.798.854	60,568
1998	618.090.000	990.132.102	62,425
1999	1.140.056.000	1.037.602.910	109,874
2000	866.023.000	1.245.016.755	69,559
2001	968.454.387	1.592.306.564	60,820
Rata-rata			60,540

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap

Tingkat efisiensi pemungutan retribusi pasar Kabupaten Cilacap tahun anggaran 1996 – 2001 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun tetapi masih dalam kriteria tingkat efisiensi yang menengah. Pada tahun 1996 efisiensi retribusi pasar dapat dikatakan efisien yaitu sebesar 54,5 %, sedangkan pada tahun 1997 efisiensi retribusi pasar mengalami kenaikan sebesar 60,6 % ini disebabkan karena adanya kenaikan biaya pemungutan seperti terlihat pada tabel 5.2. yang terdiri dari kenaikan upah pungut, biaya operasional, dan kenaikan gaji. Sehingga tingkat efisiensi tahun 1996 dapat dikatakan kinerjanya efisien dalam tingkat yang menengah.

Pada tahun 1998 kinerja efisiensi dapat dikatakan dalam tingkat efisien yang menengah yaitu sebesar 62,4 %, terjadi kenaikan pada biaya operasional akan tetapi kenaikan tersebut dapat ditutup dengan penerimaan retribusi pasar yang besar. Sehingga kenaikan biaya tersebut tidak begitu berpengaruh pada kenaikan persentase yang ada dan masih dalam tingkat efisiensi yang normal.

Pada tahun 1999 biaya pemungutan retribusi pasar melebihi realisasi yaitu sebesar Rp 1.140.056.000,00 sedangkan realisasinya penerimaan retribusi pasar hanya sebesar Rp 1.037.602.910,00 dengan tingkat efisiensi sebesar 109,8 %. Hal ini tentunya sangatlah tidak efisien, penurunan ini sebabkan karena adanya kenaikan yang sangat besar pada gaji dan tunjangan pegawai yang awalnya sebesar Rp 325.098.000,00 menjadi Rp 751.344.000,00 dan juga kenaikan biaya operasional yang terdiri dari biaya cetak karcis, biaya pengelolaan, biaya alat tulis kantor, dan biaya pemeliharaan kantor maupun pasar. Sehingga kinerja efisiensi meningkat menjadi 109,8 % dan dalam kinerja yang tidak efisien.

Pada tahun 2000 kinerja efisiensi mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 69,5 %, ini disebabkan karena adanya penurunan biaya upah pungut, biaya operasional dan gaji. Kejadian tersebut dikarenakan diberlakukannya Keputusan Bupati Nomor 02 tahun 2000 tentang tarif persewaan kios dan persewaan tempat dasaran didalam dan diluar los pasar dalam wilayah kabupaten Cilacap. Adapun kinerja efisiensi retribusi pasar masih dalam tingkat efisien yang menengah. Begitu pula yang terjadi pada tahun 2001, kinerja efisiensi masih dalam tingkat yang efisien menengah yaitu sebesar 60,8 %. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pada biaya gaji yang dikarenakan ada pengurangan pegawai. Sehingga efisiensi retribusi pasar Kabupaten Cilacap pada tahun 2001 dapat dikatakan menurun tetapi masih dalam tingkat yang normal. Adapun tingkat efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 1996 sebesar 54,5 % dan terendah pada tahun 1999 sebesar 109,8 %, dengan rata – rata sebesar 60,5 %.

Bila dibandingkan antara efisiensi Kabupaten Cilacap selama tahun 1996 – 2001 dengan tingkat efisiensi Kabupaten Sorong tahun 1994 – 1998 yang besarnya rata –rata 22,78 %.¹¹ Maka tingkat efisiensi rata –rata Kabupaten Cilacap lebih besar yaitu sebesar 60,54 % sehingga efisiensi penerimaan retribusi pasar Kabupaten Cilacap dapat dikatakan tidak efisien dibandingkan efisiensi retribusi pasar Kabupaten Sorong. Hal ini dikarenakan penerimaan variabel – variabel yang berbeda serta kebijakan masing – masing daerah mengenai retribusi pasar juga berbeda.

¹¹ Soemardji, Efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi pasar, Tesis S2 PPS MEP UGM, 2002

6.2.3 Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar

Efektivitas adalah perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi dengan target retribusi pasar. Dengan perhitungan tersebut maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 6.4.
Efektivitas Retribusi Pasar
Kabupaten Cilacap Tahun 1996 – 2001
(Dalam Rupiah)

TAHUN	TARGET	REALISASI	(%)
1996	750.000.000	759.406.166	101,2
1997	1.000.000.000	1.002.798.854	100,2
1998	987.000.000	990.132.102	100,3
1999	1.028.000.000	1.037.602.910	100,9
2000	1.189.000.000	1.245.016.755	104,7
2001	1.487.000.000	1.592.306.564	107,1
Rata – rata			103,4

Sumber : CILACAP Dalam Angka, BPS CILACAP

Tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Cilacap selama tahun anggaran 1996 – 2001 dapat dikatakan efektif. Pada tahun 1996 kinerja efektivitas dapat dikatakan efektif yaitu sebesar 101,2 %, karena perbandingan antara realisasi dan target retribusi tidak terlalu besar sehingga hasilnya sangat efektif. Begitu pula pada tahun 1997 kenaikan penerimaan pada realisasi retribusi pasar pada tahun 1997 yang besarnya Rp 1.002.798.854,00 yang sebelumnya Rp 750.406.166,00 tidak begitu meningkat kinerja efektivitas dikarenakan target penerimaan retribusi pada tahun 1997 sebesar Rp 1.000.000.000,00. Sehingga tingkat kinerja efektivitas menurun yaitu sebesar 100,2 %, akan tetapi penurunan ini masih dalam kinerja yang sangat efektif.

Pada tahun 1998 terjadi penurunan penerimaan realisasi retribusi dari Rp 1.002.798.854,00 pada tahun 1997 menjadi Rp 990.132.102,00 penurunan ini diperkirakan karena adanya krisis ekonomi sehingga memperburuk perekonomian yang ada pada kabupaten Cilacap, sehingga menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak pada berkurangnya jumlah pedagang yang ada. Namun penurunan tersebut tidak begitu banyak berarti dikarenakan target retribusi pasar disesuaikan dengan kondisi perekonomian pada tahun tersebut sehingga tingkat efektivitasnya adalah sebesar 103 %, ini berarti kinerja efektivitas pada tahun 1998 sangat efektif.

Dengan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan masyarakat mengerti dengan keadaan serba sulit dan harga yang melambung tinggi, sehingga masyarakat tidak terlalu keberatan untuk menambah daya beli pada tahun 1999. Kejadian tersebut berdampak pada kenaikan realisasi penerimaan retribusi pasar, dari Rp 990.132.102,00 pada tahun 1998 menjadi Rp 1.037.602.910,00 pada tahun 1999. Kenaikan ini mempengaruhi efektivitas pada tahun 1999 yaitu sebesar 100,9 %, ini berarti kinerja efektivitas pada tahun 1999 sangat efektif.

Pada tahun 2000 kinerja efektivitas retribusi pasar menunjukkan tingkat yang sangat efektif yaitu sebesar 104,7 %, kenaikan ini dikarenakan realisasi penerimaan retribusi pasar yaitu sebesar Rp 1.245.016.755,00 berarti adanya kenaikan sebesar Rp 207.413.845,00 dari tahun 1999. Keadaan ini tentunya dampak dari semakin membaiknya perekonomian Indonesia walaupun hanya mengalami perbaikan yang relatif sedikit. Sehingga mempengaruhi tingkat daya beli dan jumlah pedagang yang ada di Kabupaten Cilacap.

Begitu pula yang terjadi pada tahun 2001 kinerja efektivitas retribusi pasar mengalami tingkat yang sangat efektif yaitu sebesar 107,1 %, ini menandakan semakin baiknya perekonomian Indonesia sangat berpengaruh besar pada penerimaan retribusi daerah sehingga menghasilkan kinerja efektivitas yang efektif. Pada dasarnya nilai efektivitas retribusi pasar pada tahun 1996 – 2001 mengalami kenaikan dan kemajuan, dengan rata – rata sebesar 103,4 % sehingga dapat dikatakan kinerja pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Cilacap dapat dikatakan efektif. Tingkat efektivitas yang paling tinggi adalah pada tahun anggaran 2001 dan yang terendah pada tahun 1997.

Jika dibandingkan antara efektivitas penerimaan retribusi pasar Kabupaten Demak selama tahun 1995 – 2000 yang rata – rata besarnya 32,51 %¹², dengan efektivitas penerimaan retribusi pasar Kabupaten Cilacap tahun 1996 – 2001 yang rata – rata besarnya 103,4 % maka efektivitas penerimaan retribusi pasar kabupaten Cilacap lebih besar dan lebih efektif. Hal ini dapat disebabkan karena kebijakan masing – masing daerah berbeda dan penerimaan retribusi pasar jelas sangat berbeda.

6.2.4 Pertumbuhan Retribusi Daerah Dan Retribusi Pasar

6.2.4.1 Pertumbuhan Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan pembentuk Pendapatan Asli Daerah, kabupaten Cilacap memiliki penerimaan retribusi daerah yang naik turun tiap

¹² Arief Sudaryanto, Peranan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah dan potensinya kabupaten Demak, Tesis S2 PPS MEP UGM, 2002

tahunnya, ini jelas sangat mempengaruhi pertumbuhan retribusi tiap tahun.

Adapun perhitungan pertumbuhan retribusi daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 6.5.
Pertumbuhan Retribusi daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 1996 – 2001

TAHUN	RETRIBUSI DAERAH	PERTUMBUHAN (%)
1997	6.165.092.000	34,5
1998	4.884.553.370	-20,8
1999	6.678.370.929	36,7
2000	5.659.323.692	-15,3
2001	10.232.910.243	80,8
Rata – rata		23,18

Sumber : Cilacap Dalam Angka, BPS Kabupaten Cilacap

Pertumbuhan retribusi daerah yang terjadi selama tahun anggaran 1997 – 2001 mengalami perkembangan yang tidak memuaskan. Pada tahun 1997 pertumbuhan retribusi daerah mengalami kemajuan yang cukup berarti yaitu sebesar 34,5 %, pertumbuhan ini dianggap baik karena penerimaan retribusi daerah tahun 1997 lebih tinggi yaitu sebesar Rp 6.165.092.000,00 dibandingkan penerimaan retribusi daerah tahun 1996 yaitu sebesar Rp 4.583.433.000,00. Hal ini sebabkan kenaikan di beberapa penerimaan retribusi daerah seperti kenaikan uang leges, uang pemeriksaan pembantaian, uang sewa tanah dan bangunan, sempadan ijin bangunan, RSUD dan balai pengobatan, pasar, penerimaan RS dan PUSKESMAS dan kenaikan penerimaan stasiun bus dan taksi.

Pada tahun 1998 pertumbuhan retribusi daerah mengalami perkembangan yang negatif yaitu sebesar -20,8 %, kejadian ini disebabkan adanya penurunan penerimaan retribusi daerah. Penurunan penerimaan retribusi ini dikarenakan

berkurangnya pos – pos penerimaan retribusi daerah seperti penurunan pada penerimaan uang leges, dispensasi jalan, sempadan ijin bangunan, pengujian kendaraan tidak bermotor, pasar, penerimaan bea parkir, dan ijin usaha angkutan. Penurunan penerimaan pos – pos retribusi daerah dikarenakan adanya bencana krisis yang menimpa perekonomian.

Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah pada tahun 1999 mengalami perkembangan yang pesat yaitu sebesar 36,7 %, perkembangan ini merupakan dampak dari tingginya peningkatan penerimaan pada pos –pos retribusi daerah seperti penerimaan RSUD dan balai pengobatan, pasar, sewa gedung dan lap pemda, bea parkir, sehingga menghaikan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 6.678.370.929,00. Akan tetapi peningkatan ini tidak diikuti pada tahun berikutnya, pada tahun 2000 terjadi pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -15,3 %, pertumbuhan ini tentunya terjadi karena adanya penurunan pada penerimaan retribusi daerah yang disebabkan turunnya penerimaan pos – pos retribusi daerah seperti turunnya penerimaan pelayanan kesehatan, dispensasi jalan, penerimaan bea parkir dan turunnya penerimaan uang sewa bangunan. Penurunan ini juga dampak dari diberlakukannya undang – undang otonomi daerah sehingga daerah harus dapat mencari potensi yang terdapat dimasing – masing daerah dan tidak tergantung terhadap pemerintahan pusat.

Pada tahun 2001 terjadi pertumbuhan retribusi daerah yang meningkatkan tajam dari tahun sebelumnya 80,8 %, kenaikan ini dikarenakan penerimaan pos – pos retribusi daerah secara keseluruhan mengalami peningkatan yang besar terutama pada penerimaan pelayanan kesehatan, uang sewa tanah dan bangunan,

bea parkir dan penerimaan stasiun bus dan taksi. Selain itu juga karena pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dapat memaksimalkan potensi – potensi yang belum tergali menjadi penerimaan yang cukup dapat menambah penerimaan retribusi daerah yang besarnya Rp 10.232.910.243,00. Pertumbuhan retribusi daerah Kabupaten Cilacap rata – rata sebesar 23,18 % Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 80,8 % dan yang terendah pada tahun 1998 yang besarnya - 20,8 %.

6.2.4.2 Pertumbuhan Retribusi Pasar

Pertumbuhan retribusi pasar Kabupaten Cilacap merupakan perbandingan antara penerimaan retribusi pasar dari tahun ketahun. Perhitungan pertumbuhan retribusi pasar dapat dilihat pada tabel 6.6.

Tabel 6.6.
Pertumbuhan Retribusi Pasar
Kabupaten Cilacap Tahun 1996 – 2001

TAHUN	RETRIBUSI PASAR	PERTUMBUHAN (%)
1997	1.002.798.854	32.05
1998	990.132.102	-1.26
1999	1.037.602.910	4.79
2000	1.245.016.755	19.98
2001	1.592.306.564	27.89
Rata – rata		16.69

Sumber : Cilacap Dalam Angka, BPS Kabupaten Cilacap

Pertumbuhan retribusi pasar yang terjadi selama tahun 1996 – 2001 mengalami perkembangan yang normal hampir tiap tahunnya. Seperti pada tahun

1997 perkembangan pertumbuhan retribusi pasar yaitu sebesar 32,5 %, angka ini masih terbilang tinggi karena penerimaan tahun 1997 lebih besar dibanding 1996. Pada tahun 1998 terjadi pertumbuhan mengalami penurunan yang drastis yaitu sebesar - 1,26 %, angka ini terjadi karena penerimaan tahun 1998 lebih kecil daripada tahun 1997 dan juga adanya krisis ekonomi yang menimpa perekonomian Indonesia. Dengan adanya krisis mengakibatkan harga menjadi melambung tinggi sehingga terjadi penurunan pada daya beli masyarakat, dan dampaknya terjadi pertumbuhan yang negatif.

Pada tahun 1999 pertumbuhan retribusi pasar mengalami kemajuan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,79 %, angka ini tentunya baik daripada tahun 1998. Perkembangan ini dipicu adanya peningkatan daya beli masyarakat dan semakin membaiknya perekonomian Indonesia. Pada tahun 2000 pertumbuhan retribusi pasar mengalami peningkatan dari tahun 1999 yaitu sebesar 19,98 %, perkembangan ini terjadi dikarenakan diberlakukannya UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Cilacap mencoba mencari potensi – potensi yang belum tergali dan hasilnya terjadi peningkatan pada penerimaan retribusi pasar.

Pada tahun 2001 pertumbuhan retribusi pasar mengalami pertumbuhan yang pesat yaitu sebesar 27,89 %, kejadian ini disebabkan adanya kenaikan penerimaan retribusi pasar dari tahun sebelum. Keadaan ini dipicu oleh berlaku Keputusan Bupati kabupaten Cilacap No 02 tahun 2000 tentang tarif persewaan kios dan persewaan tempat dasaran didalam dan diluar los pasar. Sehingga dengan diberlakukannya keputusan tersebut penerimaan potensi yang belum dapat tergali

sedikit demi sedikit dapat digali dan menjadi penerimaan yang dapat menambah pemasukan yang ada. Pertumbuhan retribusi pasar tahun 1997 – 2001 rata – rata sebesar 16,69 %. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 1997 yaitu sebesar 32.05 % dan pertumbuhan terendah pada tahun 1998 yaitu – 1,26 %.

Bila dibandingkan antara pertumbuhan retribusi pasar kota Depok untuk tahun 1999 – 2001 yang rata – rata besarnya 77,07 %¹³ pertahun dengan pertumbuhan retribusi pasar tahun 1996 – 2001 kabupaten Cilacap yang rata – rata besarnya 16,69 % maka tingkat pertumbuhan retribusi pasar kabupaten Cilacap lebih kecil hal ini dikarenakan penerimaan retribusi pasar yang berbeda untuk tiap – tiap daerah dan juga perbedaan periode waktu yang digunakan.

6.2.5 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD

Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD merupakan perbandingan penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah yang kemudian dilihat seberapa besar dan berpengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah.pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun 1996 -2001 memiliki perhitungan kontribusi retribusi pasar yang relatif kecil seperti terlihat pada tabel berikut.

¹³ Dudi Mi'raz Imaduddin, *op.cit*

Tabel 6.7.
Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap PAD
Kabupaten Cilacap Tahun 1996 – 2001
(Dalam Rupiah)

TAHUN	RETRIBUSI PASAR	PAD	(%)
1996	759.406.166	8.256.312.000	9.19
1997	1.002.798.854	9.566.869.000	10.4
1998	990.132.102	14.016.803.004	7.06
1999	1.037.602.910	26.179.521.003	3.96
2000	1.245.016.755	19.278.950.738	6.45
2001	1.592.306.564	32.112.949.517	4.95
Rata - rata			7,00

Sumber : Cilacap Dalam Angka, BPS Kabupaten Cilacap

Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap selama tahun 1996 – 2001 mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Pada tahun 1996 kontribusi retribusi pasar terhadap PAD yaitu sebesar 9,1 %, perkembangan ini dapat dikatakan baik karena retribusi pasar merupakan bagian dari PAD. Pada tahun 1997 terjadi kenaikan kontribusi yaitu sebesar 10,4 %, kenaikan ini dikarenakan adanya peningkatan pada penerimaan tahun 1997 yaitu sebesar Rp 1.002.798.854,00 sehingga terjadi kenaikan kontribusi. Pada tahun 1998 dan tahun 1999 terjadi penurunan kontribusi ini dikarenakan turunnya penerimaan retribusi pasar sehingga hasil menjadi 7,06 % untuk tahun 1998 dan 3,96 % untuk tahun 1999. Pada tahun 2000 terjadi peningkatan kontribusi yaitu sebesar 6,45 %, dan pada tahun 2001 terjadi penurunan yaitu sebesar 4,95 %, penurunan ini disebabkan adanya kenaikan yang begitu besar pada penerimaan PAD yang dipicu oleh meningkatnya penerimaan pendapatan lain – lain.

Kontribusi retribusi daerah tahun 1996 – tahun 2001 rata –rata sebesar 7 %. Kontribusi terbesar pada tahun 1997 yaitu sebesar 10,4 % dan yang terendah pada tahun 1999 yaitu sebesar 3,95 %, kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cilacap dapat dikatakan relatif kecil, kontribusi yang kecil ini disebabkan karena adanya pengaruh krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga terjadi kontribusi yang rendah, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Cilacap masih sulit dalam mencari potensi – potensi retribusi pasar yang ada.

Bila dibandingkan dengan penerimaan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD kota Depok untuk tahun 1999 – 2001 yang rata – rata besarnya 1,24 %¹⁴ dengan penerimaan kontribusi retribusi pasar tahun 1996 – 2001 Kabupaten Cilacap yang rata –rata besarnya 7 % maka kontribusi retribusi pasar terhadap PAD kabupaten Cilacap lebih besar ini berarti pemasukan retribusi pasar Kabupaten Cilacap lebih besar dibandingkan Kota Depok. Selain itu juga karena periode waktu yang digunakan berbeda serta kebijakan untuk tiap daerah tentunya berbeda satu dengan yang lainnya.

¹⁴ *ibid*

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

1. Potensi retribusi pasar di Kabupaten Cilacap tahun 2001 yaitu Rp 1.666.150.967,00, sedangkan target dan realisasi pada tahun 2001 sebesar Rp 1.487.000.000,00 atau 89,24 % dan Rp 1.592.306.564,00 atau 95,56 % dari potensi yang ada. Hal ini berarti masih terdapat kemungkinan potensi yang belum tergali dan belum dikembangkan seperti pendataan pedagang, penertiban para pedagang dan juga kenaikan tarif retribusi pasar agar dapat menghasilkan penerimaan yang lebih maksimal.
2. Tingkat efisiensi pemungutan retribusi pasar Kabupaten Cilacap tahun anggaran 1996 – 2001 cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun tetapi masih dalam kriteria tingkat efisiensi yang menengah, dengan rata – rata sebesar 60,5 %. Akan tetapi pada tahun 1999 tingkat efisiensi sebesar 109,8 % hal ini tentunya sangatlah tidak efisien, penurunan ini disebabkan karena adanya kenaikan yang sangat besar pada gaji dan tunjangan pegawai yang awalnya sebesar Rp 325.098.000,00 menjadi Rp 751.344.000,00. Kenaikan biaya – biaya operasional yang terdiri dari biaya cetak karcis, biaya pengelolaan, biaya alat tulis kantor, dan biaya pemeliharaan kantor

maupun pasar. Adapun tingkat efisiensi tertinggi pada tahun 1996 sebesar 54,5 % dan terendah pada tahun 1999 sebesar 109,8 %.

3. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar di kabupaten Cilacap selama tahun anggaran 1996 – 2001 dapat dikatakan efektif dengan rata – rata 103,4 %. Tingkat efektivitas yang paling tinggi adalah pada tahun anggaran 2001 sebesar 107,1 %, dan yang terendah pada tahun 1997 sebesar 100,2 %.
4. Pertumbuhan yang terjadi selama tahun anggaran 1996 – 2001 mengalami perkembangan yang tidak memuaskan dengan rata – rata sebesar 23,18 %. Pertumbuhan retribusi daerah mengalami perkembangan yang negatif seperti pada pertumbuhan retribusi daerah tahun 1998 yang nilainya negatif - 20,8 % dikarenakan penurunan penerimaan retribusi pasar seperti uang leges, dispensasi jalan, ijin bangunan, penerimaan pasar, bea parkir dan ijin usaha angkutan. Begitu pula pada pertumbuhan retribusi daerah tahun 2000 yang nilainya negatif -15,3 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2001 sebesar 80,8 % dan yang terendah pada tahun 1998 yang besarnya -20,8 %.
5. Pertumbuhan retribusi pasar yang terjadi selama tahun 1996 – 2001 mengalami perkembangan yang normal hampir tiap tahunnya dengan rata – rata sebesar 16,69 %. Tetapi pada tahun 1998 mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar – 1,26 %, yang disebabkan adanya krisis ekonomi yang menimpa perekonomian Indonesia.

Pertumbuhan tertinggi pada tahun 1997 yaitu sebesar 32,05 % dan pertumbuhan terendah pada tahun 1998 yaitu – 1,26 %.

6. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 1996 – 2001 mengalami perkembangan yang berfluktuatif dengan rata –rata sebesar 7 %. Kontribusi terbesar pada tahun 1997 yaitu sebesar 10,4 % dan yang terendah pada tahun 1999 yaitu sebesar 3,95 %, kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Cilacap dapat dikatakan relatif kecil, kontribusi yang kecil ini disebabkan karena adanya pengaruh krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga terjadi kontribusi yang rendah, sehingga pemerintah daerah kabupaten Cilacap masih sulit dalam mencari potensi – potensi retribusi pasar yang ada

7.2. SARAN

Dengan keadaan penerimaan retribusi pasar yang masih kurang pemerintah kabupaten Cilacap hendaknya menetapkan beberapa kemungkinan - kemungkinan peningkatan penerimaan retribusi yaitu dengan cara :

1. Pendataan pedagang secara periodik karena jumlah pedagang tiap tahun akan bertambah.
2. Penertiban pedagang yang belum membayar ijin kios, maupun tarif yang dikenakan, karena semakin banyak pedagang yang tidak membayar akan mengurangi pemasukan retribusi pasar.

3. Perlunya peningkatan tarif yang dikenakan bagi para pedagang karena tarif yang ada tidak terlalu besar guna memaksimalkan penerimaan retribusi pasar sehingga perlu dilakukan tarif yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan pasar dan juga keadaan para pedagang agar penerimaan retribusi pasar dapat meningkat.
4. Pemerintah daerah memerlukan penerimaan retribusi yang lebih besar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah yaitu dengan mencari potensi – potensi yang belum tergali dan melakukan hubungan kerja dengan daerah lain guna memajukan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002.
- Abdurrahim Marsaoly, *Potensi, Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Ternate*, Tesis S2 PPS MEP UGM, 2002.
- Arief Sudaryanto, *Peranan Retribusi Pasar Terhadap PAD dan Potensinya di Kota Demak*, Tesis S2 PPS MEP UGM, 2001.
- Bagus Santoso, *Retribusi Pasar Sebagai Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pasar Sleman*, Prisma nomor 4, LP3S, 1995.
- Cilacap Dalam Angka**, BPS Cilacap, Berbagai Terbitan.
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap, Berbagai Terbitan.
- Dudi Mi'raz Imaduddin, *Potensi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Depok*, Tesis S2 PPS MEP UGM, 2002.
- Guritno Mangkoesoebroto, *Kebijakan Ekonomi Publik*, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta, 1994.
- Keputusan Bupati Kabupaten Cilacap No 2 Tahun 2000 tentang tentang tarif persewaan kios dan persewaan tempat dasaran didalam dan diluar los pasar.
- Machfud Sidik, *Keuangan Daerah*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1994
- Mardiasmo dan Makhfatih, *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*, Laporan Akhir PPS MEP UGM, 2000
- Muhammad Aji Wibowo, *Efisiensi Efektifitas, Pertumbuhan dan Proporsi Retribusi Pasar di Kabupaten Sleman*, Tesis S2 PPS MEP UGM, 1999
- Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap No 11 Tahun 1995 yang berisi tentang pemungutan retribusi pasar.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2001.

Soemardji, *Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pasar Berdasarkan Potensi di kabupaten Sorong*, Tesis S2 PPS MEP UGM, 2000.

Undang – Undang Otonomi Daerah Tahun 1999, Citra Umbara, Bandung, 2001.

Undang – Undang Republik Indonesia No 34 tahun 2000 tentang retribusi daerah .

Widodo HG Suseno, *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990

Lampiran

**Potensi Kios Retribusi Pasar
Kabupaten Cilacap Tahun 2001**

Nama Pasar (1)	Luas Kios		Tarif / m / Hari		Potensi {(2x4)+(3x5)} 360
	Depan (2)	Dalam (3)	Depan (4)	Dalam (5)	
Gede	365,5	2638,5	150	135	147.968.100
Sidodadi	432	360	150	135	40.824.000
Kroya	437,97	1615,5	150	135	102.139.272
Sampang	468,5	249	150	135	37.400.400
Gandrungmangu	444	202	150	135	36.709.200
Majenang	609,9	740	150	135	68.898.600
Pasar Kelas II					
Adipala	440	222	120	110	27.799.200
Sidareja	463,5	90	120	110	23.587.200
Kawunganten	279	-	120	-	12.052.800
Lebeng	309	-	120	-	13.348.800
Wanareja	920	768	120	110	72.921.600
Cipari	144	-	120	-	6.220.800
Kesugihan	240	130	120	110	15.516.000
Ikan(PPC)	1068	-	120	-	46.137.600
Tanjung Sari	352	90	120	110	18.770.400
Saliwangi	156	-	120	-	6.739.200
Palemgading	336	-	120	-	14.512.200
Pasar Kelas III					
Gumilir	264	-	90	-	8.553.600
Maos kidul	183	-	90	-	5.929.200
Binangun	252	-	90	-	8.164.800
Kemojing	60	-	90	-	1.944.000
Karangputat	12	-	90	-	2.721.600
Sarwodadi	24	-	90	-	777.600
Nusawungu	180	-	90	-	5.832.000
Sentolo umum	470	-	90	-	15.228.000
Panimbang	160	-	90	-	576.000
Potensi kios tahun 2001					741.275.172

Keterangan :

Potensi kios (Pk) kabupaten Cilacap tahun 2001

$$Pk = (\sum lk \times rk \times hp)$$

lk = Luas kios, meter

rk = Tarif retribusi kios, rupiah

hp = Hari pasaran yang jumlahnya bervariasi yaitu 72 hari, 104 hari, dan 360 hari

**Potensi Sewa Tanah Retribusi Pasar
Kabupaten Cilacap Tahun 2001**

Nama Pasar (1)	Luas Kios		Tarif / m / Hari		Potensi
	Depan (2)	Dalam (3)	Depan (4)	Dalam (5)	{(2x4)+(3x5)} 360
Gede	365,5	2638,5	2500	2000	6.190.750
Sidodadi	432	360	2500	2000	1.800.000
Kroya	437,97	1615,5	2500	2000	4.325.925
Sampang	468,5	249	2500	2000	1.669.250
Gandrungmangu	444	202	2500	2000	1.634.000
Majenang	609,9	740	2500	2000	3.004.750
Pasar Kelas II					
Adipala	440	222	1500	1000	882.000
Sidareja	463,5	90	1500	1000	785.250
Kawunganten	279	-	1500	-	418.500
Lebeng	309	-	1500	-	463.500
Wanareja	920	768	1500	1000	2.148.000
Cipari	144	-	1500	-	216.000
Kesugihan	240	130	1500	1000	490.000
Ikan(PPC)	1068	-	1500	-	1.602.000
Tanjung Sari	352	90	1500	1000	618.000
Saliwangi	156	-	1500	-	234.000
Palemgading	336	-	1500	-	504.000
Pasar Kelas III					
Gumilir	264	-	750	-	198.000
Maos kidul	183	-	750	-	137.250
Binangun	252	-	750	-	189.000
Kemojing	60	-	750	-	45.000
Karangputat	12	-	750	-	9.000
Sarwodadi	24	-	750	-	18.000
Nusawungu	180	-	750	-	135.000
Sentolo umum	470	-	750	-	352.500
Panimbang	160	-	750	-	120.000
Potensi Sewa Tanah					28.189.675

Potensi sewa tanah (Ps) kabupaten Cilacap tahun 2001

$$Ps = (\sum lk \times rs \times hp)$$

lk = Luas kios, meter

rk = Tarif retribusi sewa tanah, rupiah

hp = Hari pasaran yang jumlahnya bervariasi yaitu 72 hari, 104 hari, dan 360 hari

Potensi Los Retribusi Pasar Tahun 2001

Nama Pasar	Hari Pasar (2)	Non Pasar (3)	Luas Los (4)	Tarif/ m / hari (5)	Potensi (2 x 3 x 4 x 5)
Pasar Kelas I (1)					
Gede	-	360	2295	120	99.144.000
Sidodadi	-	360	1648	120	71.193.600
Kroya	72	-	2970	120	25.660.800
Sampang	-	280	2385	120	82.425.600
	72	-	1824	120	16.416.000
Gandrungmangu	-	285	1459,2	120	49.904.640
	104	-	1773	120	22.127.040
Majenang	-	256	1062	120	32.624.640
	104	-	2530	120	31.574.400
	-	256	2024	120	62.177.280
Pasar Kelas II					
Adipala	72	-	1100	90	7.128.000
	-	288	772	90	20.020.240
Sidareja	72	-	1047	90	6.784.560
	-	308	942	90	26.112.240
Kawunganten	104	-	2152	90	20.142.720
	-	256	680	90	15.667.200
Lebeng	72	-	972	90	6.298.560
	-	288	135	90	3.499.200
Wanareja	104	-	544,5	90	5.096.520
	-	256	450	90	10.368.000
Cipari	104	-	936	90	8.760.900
Kesugihan	72	-	774	90	5.015.520
	-	288	225	90	5.832.000
Ikan (PPC)	360	-	441	90	14.288.400
Tanjung Sari	72	-	783	90	25.364.200
Saliwangi	104	-	2154	90	13.851.000
Palemgading	360	-	337,5	90	10.935.000
Sentolo hewan	104	-	72	90	673.920
Pasar Kelas III					
Gumilir	360	-	108	67,5	2.624.400
Maos kidul	104	-	1092	67,5	7.665.840
Binangun	72	-	328,5	67,5	1.596.510
Kemojing	72	-	373,5	67,5	1.815.210
Karangputat	104	-	688,5	67,5	3.346.110
Sarwodadi	104	-	162	67,5	1.137.240
Sikampuh	104	-	207	67,5	1.453.140
Nusawungu	104	-	168,5	67,5	1.182.870
	-	256	216	67,5	3.732.480
Klumprit	102	-	90	67,5	619.650
Banjareja	104	-	373,5	67,5	2.621.970
Sentolo umun	72	-	288	67,5	1.399.680
Panimbang	52	-	549	67,5	1.926.990
Potensi los tahun 2001					730.198.270

Potensi los (PI) kabupaten Cilacap tahun 2001

$$PI = (\sum l \times r \times hp)$$

l = Luas los, meter

r = Tarif retribusi los, rupiah

hp = Hari pasaran yang jumlahnya bervariasi yaitu 72 hari, 104 hari, dan 360 hari

Potensi Plataran Retribusi Pasar Tahun 2001

Nama Pasar	Hari Pasaran	Jumlah Pedagang	Tarif / m / hari	Potensi
Pasar Kelas I				
Gede	-	702	250	175500
Sidodadi	-	225	250	56250
Kroya	72	325	250	5850000
	-	260	250	65000
Sampang	104	250	250	6500000
	-	225	250	56250
Gandrungmangu	104	322	250	8372000
	-	190	250	47500
Majenang	104	490	250	12740000
	-	392	250	98000
Adipala	72	112	250	2016000
	-	28	250	7000
Pasar Kelas II				
Sidareja	72	194	200	2793600
	-	175	200	35000
Kawunganten	104	235	200	4888000
	-	100	200	20000
Lebeng	72	254	200	3657600
	-	45	200	9000
Wanareja	104	137	200	2849600
	-	91	200	18200
Cipari	104	413	200	8590400
Kesugihan	72	180	200	2592000
	-	40	200	8000
Tanjung Sari				
Saliwangi	360	69	200	4968000
Sentolo Hewan	360	234	200	16848000
	104	92	200	1913600
Pasar Kelas III				
Karangkandri	104	314	150	4898400
Maos kidul	72	163	150	1760400
Maos lor	365	117	150	6405750
Binangun	72	217	150	2343600
Kemojing	72	133	150	1436400
Karangputat	104	116	150	1809600
Sarwodadi	104	60	150	936000
Sikampus	104	12	150	187200
Nusawungu	104	126	150	1965600
	-	58	150	8700
Klumprit	102	60	150	918000
Banjareja	104	117	150	1825200
Sentolo Umum	72	92	150	993600
Panimbang	52	323	150	2519400
Potensi plataran tahun 2001				113006850

Potensi plataran (Pp) kabupaten Cilacap tahun 2001

$$Pp = (\Sigma ls \times rp \times hp)$$

ls = Jumlah pedagang

rp = Tarif platran los, rupiah

hp = Hari pasaran yang jumlahnya bervariasi yaitu 72 hari, 104 hari, dan 360 hari

**Potensi Ijin Kios Retribusi Pasar
Kabupaten Cilacap Tahun 2001**

Nama pasar	Jumlah Pedagang	Ijin Kios	Potensi
Pasar Kelas I			
Gede	217	15.000	3255000
Sidodadi	69	15.000	1035000
Kroya	186	15.000	2790000
Sampang	56	15.000	840000
Gandrungmangu	75	15.000	1125000
Majenang	115	15.000	1725000
Pasar Kelas II			
Adipala	63	12.000	756000
Sidareja	44	12.000	528000
Kawunganten	31	12.000	372000
Lebeng	19	12.000	228000
Wanareja	78	12.000	936000
Cipari	18	12.000	216000
Kesugihan	26	12.000	312000
Ikan(PPC)	89	12.000	1068000
Tanjung Sari	32	12.000	384000
Saliwangi	31	12.000	372000
Palemgading	24	12.000	288000
Pasar Kelas III			
Gumilir	22	9000	198000
Maos kidul	11	9000	99000
Binangun	18	9000	162000
Kemojing	5	9000	45000
Karangputat	7	9000	63000
Sarwodadi	2	9000	18000
Nusawungu	10	9000	90000
Sentolo umum	18	9000	162000
Panimbang	10	9000	90000
Potensi ijin kios tahun 2001			17157000

Potensi ijin kios (Pik)tahun 2001

Pik = (Σ ls x ik)

ls = Jumlah pedagang

ik = Ijin kios

**Potensi Ijin Los Retribusi Pasar
Kabupaten Cilacap Tahun 2001**

Nama pasar	Jumlah Pedagang	Ijin los / th (RP)	Potensi
Pasar Kelas I			
Gede	510	5.000	2550000
Sidodadi	206	5.000	1030000
Kroya	660	5.000	3300000
Sampang	292	5.000	1460000
Gandrungmangu	354	5.000	1770000
Majenang	701	5.000	3505000
Pasar Kelas II			
Adipala	275	4.000	1100000
Sidareja	274	4.000	1096000
Kawunganten	359	4.000	1436000
Lebeng	216	4.000	864000
Wanareja	121	4.000	484000
Cipari	123	4.000	492000
Kesugihan	186	4.000	744000
Ikan(PPC)	98	4.000	392000
Tanjung Sari	126	4.000	504000
Saliwangi	95	4.000	380000
Palemgading	16	4.000	64000
Pasar Kelas III			
Gumilir	27	9000	81000
Karangkandri	162	9000	486000
Maos kidul	170	9000	510000
Binangun	83	9000	249000
Kemojing	153	9000	459000
Karangputat	36	9000	108000
Sarwodadi	30	9000	90000
Sikampung	15	9000	45000
Nuawungu	36	9000	108000
Klumprit	20	9000	60000
Banjareja	83	9000	249000
Sentolo Umun	16	9000	48000
Panimbang	102	9000	306000
Potensi ijin los			23970000

Potensi ijin los (Pil) tahun 2001

Pil = (Σ *ls* x *il*)

ls = Jumlah pedagang

il = Ijin los

**Potensi Hewan Kecil Retribusi Pasar
Kabupaten Cilacap Tahun 2001**

Nama Pasar	Jumlah Hewan Kecil	Tarif (ekor / hari)	Hari Pasaran	Potensi
Gandrungmangu	40	250	104	1040000
Adipala	50	250	72	900000
Kawunganten	35	250	104	910000
Lebeng	40	250	72	720000
Cipari	60	250	104	1560000
Kesugihan	20	250	72	360000
Sentolo hewan	90	250	104	2340000
Hewan Majenang	50	250	72	900000
Karangkandri	84	250	104	2184000
Kemojing	40	250	72	720000
Maos Kidul	40	250	72	720000
Potensi hewan kecil tahun 2001				12354000

Potensi hewan kecil (Phk) tahun 2001

$$Phk = (\sum hk \times rhk \times hp)$$

hk = Hewan kecil

rhk = tarif retribusi hewan kecil

hp = Hari pasaran yang jumlahnya bervariasi yaitu 72 hari, 104 hari, dan 360 hari